

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, maka pemerintah telah menetapkan suatu standar nasional pendidikan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah disempurnakan menjadi Permendikbud No 32 tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP). SNP ini menjadi acuan dan kriteria bagi setiap satuan pendidikan dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran serta pengawasan terhadap setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan satuan pendidikan sehingga masing-masing bisa mencapai standar minimal bahkan di atas standar nasional yang ditentukan.

Delapan SNP secara terperinci memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:

1) Sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. 2) Bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 3) Untuk disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Namun yang menjadi persoalan di lapangan adalah bagaimana satuan pendidikan dapat mengkolaborasi delapan komponen SNP menjadi satu kesatuan yang utuh untuk diterapkan, sementara masih ada perbedaan pemahaman,

pemikiran, mengenai komponen tersebut? Hal ini membutuhkan perhatian yang serius dan proses yang panjang dari semua satuan pendidikan yang ada di Indonesia.

Secara umum mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah, walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan data penelitian *Human Development Index* (HDI) pada tahun 2012, kualitas pendidikan Indonesia di peringkat 124 dari 187 negara dan pada tahun 2013 naik tiga peringkat menjadi ranking ke-121 dari 185. Selanjutnya berdasarkan data *Education For All* (EFA) *Global Monitoring Report* 2014, indeks pembangunan pendidikan (*Education Development Index/EDI*) untuk Indonesia 0,938. Nilai ini menempatkan Indonesia di posisi ke-57 dari 115 negara di dunia. Posisi Indonesia termasuk dalam EDI sedang, namun masih tertinggal dari Brunei yang berada di peringkat ke-34 yang masuk kelompok pencapaian sangat tinggi bersama Jepang yang mencapai posisi nomor satu di dunia. Sementara Singapura peringkat ke-18 dan Malaysia berada di peringkat ke-6. Meskipun demikian posisi Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dari Filipina (85), Kamboja (102), India (107), dan Laos (109). Terlepas dari pemeringkatan ini, bisa diperdebatkan atau tidak, penurunan satu peringkat tentu sudah memprihatinkan. (litbang.kemdikbud.go.id diunduh 29 Januari 2016)

Balitbang dalam Jurnal Sekolah Dasar Teori dan Praktik Pendidikan (2009: 19) mencatat, dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya ada 8 SD yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program* (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata hanya ada 8 SMP yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP), dan dari

8.036 SMA ternyata hanya ada 7 SMA yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program* (DP). Khusus kualitas guru (2002-2003), data guru yang layak mengajar di SD hanya 21,07 % (negeri) dan 28,94% (swasta), di SMP hanya 54,12 % (negeri) dan 60,09 % (swasta), di SMA 65,29 % (negeri) dan 64, 73 % (swasta), dan di SMK 55,49% (negeri) dan 58,26 % (swasta).

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu memang tidak mudah. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang memiliki banyak faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Salah satu faktor yang harus dibenahi lebih dahulu adalah guru. Karena guru adalah salah satu komponen pendidikan yang merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan. Seperti apa yang dinyatakan Bapak Anies Baswedan selaku Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, “Di pundak para guru ada wajah masa depan Indonesia (Kompas.com, 24 November 2014).

Menurut UU No 14 tahun 2005 bahwa Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas suatu satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati dan raganya. Kita tahu, bahwa dari sekian banyak komponen pendidikan, guru merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Berapa pun besarnya investasi yang kita tanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan kita, tanpa kehadiran guru yang kompeten, professional, bermartabat dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan.

Selanjutnya dikatakan bahwa guru harus menyadari bahwa mereka adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai tenaga profesional, maka guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (UU No 14 tahun 2005)

Meskipun jabatan guru merupakan jabatan profesional, tidak sedikit guru dalam melaksanakan tugasnya tidak profesional, dan sudah menjadi rahasia umum misalnya terlambat masuk kelas, menggunakan sumber belajar yang hanya terfokus kepada buku teks, RPP yang tidak lengkap. Purba (2014 : 5) menyimpulkan hasil angket kepada 25 guru di SMKN 1 Merdeka, Kabupaten Karo bahwa diperoleh sebanyak 58 % guru jarang menerapkan teori-teori belajar untuk kegiatan proses belajar mengajar dan 14 % tidak pernah mengaplikasikannya. Sementara itu hasil survey awal oleh Dewi (2014: 4) terhadap salah satu pengawas SMP bidang studi Bahasa Indonesia di kabupaten Deli Serdang Bedagai menemukan masih banyak guru yang melakukan copy paste terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP tersebut berasal dari internet atau file guru dari sekolah lain. Guru tidak memiliki program tahunan, program semester, silabus bahkan RPP. Demikian juga hasil wawancara Soni (2014: 6) bahwa guru-guru di SMA Negeri Unggul Aceh Timur dari 30 orang guru diperoleh data bahwa hanya 40% (12 orang) guru yang menggunakan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap kali pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran yang dilaksanakan hanya berdasarkan keinginan guru dan juga kondisi siswa di kelas. RPP hanya berupa softcopy di dalam laptop dan tidak dicetak untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mengajar, sehingga RPP hanya berfungsi sebagai bagian administratif dalam pembelajaran.

Survey awal Naibaho (2015: 5) melalui wawancara dengan pengawas SMP bidang studi Bahasa Indonesia di Kota Binjai tanggal 23 maret 2015, mengatakan sekitar 60% dari 57 guru binaannya masih melakukan copy paste dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP tersebut berasal dari internet atau file guru dari sekolah lain. Selanjutnya 25 % guru tidak memiliki program tahunan, program semester, silabus bahkan RPP. Bahkan pengawas mengatakan masih banyak guru yang tidak mau disupervisi atau sengaja menghindar bila seorang pengawas datang ke sekolah untuk melakukan supervisi di kelas.

Guru memiliki peran yang sangat strategis, baik sebagai perencana pembelajaran, pelaksana pembelajaran, dan penilai pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh karena guru adalah orang yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran di sekolah. Maka sebagai tenaga professional, seharusnya guru senantiasa berusaha untuk mengupdate ilmu yang dimilikinya, memperbaharui kinerjanya dan selalu mengisi literasi informasi dengan berbagai kegiatan dan latihan. Seperti yang diungkapkan Sagala (2011: 38) guru seharusnya dapat melakukan inovasi pembelajaran. Sebaliknya inovasi pembelajaran bagi guru relatif tertutup dan kreatifitas dinilai bukan bagian dari prestasi. Sehingga

kemampuan guru tidak dapat berkembang, hal ini disebabkan karena guru belum menguasai materi bidang studinya sendiri, pedagogis, didaktik, dan metodik keahlian pribadi dan sosial, khususnya berdisiplin dan bermotivasi, kurangnya kerja tim antara sesama guru dan tenaga pendidik lainnya.

Usaha-usaha untuk mempersiapkan guru menjadi tenaga profesional telah banyak dilakukan seperti lokakarya/workshop melalui MGMP/KKG, bimbingan teknis, diklat, supervisi dari kepala sekolah atau pengawas. Haryono dalam Kompri (2015 : 145) menyatakan bahwa secara teknis kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru antara lain program : 1) pembimbingan dan penugasan; 2) pendidikan dan pelatihan; 3) studi lanjut; 4) promosi jabatan; 5) konferensi, lokakarya dan seminar; 6) pembinaan melalui supervisi pembelajaran. Sementara Collete dan Ciappetta dikutip Sprihartiningrum dalam Kompri (2015: 173) kegiatan pengembangan profesi guru dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu studi lanjut, inservice training, memberdayakan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), memberdayakan organisasi profesi, dan mengevaluasi kinerja mengajar di kelas, sertifikasi dan uji kompetensi. Secara Nasional Pemerintah mengadakan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) untuk menjamin dan menjaga kredibilitas guru sebagai tenaga profesional dengan mendapat sertifikat profesional dan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan (tunjangan profesi) sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Namun kegiatan tersebut nampaknya belum secara signifikan mempengaruhi kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran tepatnya

terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal itu senada dengan pendapat Kompri (2015: 138) sejak kebijakan sertifikasi dilaksanakan, banyak pendidik yang memperoleh sertifikat pendidik sebagai bentuk pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Pada 2007 guru yang tersertifikasi berjumlah 182.706 orang. Jumlah ini ditambah lagi pada 2008 sebanyak 171.575 orang. Jumlah ini belum termasuk hasil sertifikasi pada 2009-2010. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta merta memiliki kaitan yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Selain komponen guru, komponen kurikulum juga merupakan salah satu aspek yang memengaruhi mutu pendidikan. Kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Berhasil tidaknya sebuah pendidikan sangat bergantung dengan kurikulum yang digunakan. Kurikulum adalah ujung tombak bagi terlaksananya kegiatan pendidikan. Tanpa adanya kurikulum mustahil pendidikan akan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Karena itu, kurikulum sangat perlu untuk diperhatikan di masing-masing satuan pendidikan. Seperti yang diungkapkan Fadlillah (2014: 13) bahwa “kurikulum merupakan salah satu penentu keberhasilan pendidikan.”

Sejak tahun ajaran 2013/2014 Pemerintah telah memberlakukan secara Nasional Kurikulum 2013. Hal ini merupakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan ditengah persaingan global. Pada dasarnya kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari Kurikulum 2004 (KBK) dan Kurikulum 2006 (KTSP). Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yaitu menitikberatkan penilaian sikap

(jujur, santun, disiplin), pengetahuan dan keterampilan (melalui tugas praktek/proyek sekolah) dengan menggunakan pendekatan saintifik. Beberapa komponen dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang mengalami perubahan dari Kurikulum 2004 (KBK) dan Kurikulum 2006 (KTSP). Hal tersebut membutuhkan pemahaman dari tenaga pendidik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan BAB IV pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien salah satu hal dan yang pertama dilakukan adalah melakukan perencanaan proses pembelajaran.

Senada dengan pendapat di atas Sahertian (2010:134) mengemukakan mengajar tidak sekedar mengkomunikasikan pengetahuan agar diketahui subjek didik, tetapi mengajar harus diartikan menolong si pelajar agar dapat belajar. Mengajar berarti usaha menolong si pelajar agar mampu memahami konsep-konsep dan dapat menerapkan konsep yang dipahami. Mengajar jangan dijadikan tugas rutin, mengajar bukan hanya suatu pengetahuan, tapi juga keterampilan atau memiliki kiat (seni) dalam mengajar. Mengajar harus dipersiapkan dengan baik. Guru perlu menyediakan waktu untuk mengadakan persiapan yang matang termasuk persiapan batin. Jadi guru seharusnya dipandang sebagai seorang ahli



mode atau perancang program pembelajaran. Ia harus menguasai dan terlatih dalam menyusun skenario pembelajaran.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa guru sebagai fasilitator dan motivator dalam mengelola proses pembelajaran di kelas mempunyai andil menentukan kualitas pendidikan. Konsekuensinya adalah guru sudah harus mempersiapkan atau merencanakan segala sesuatu sedemikian rupa tentang apa yang akan disampaikan di kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Dengan demikian efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan atau kegiatan termasuk kegiatan pembelajaran, dapat tercapai apabila direncanakan secara matang, karena dengan perencanaan yang baik, berbagai strategi, model, metode dan teknik dapat dikemas untuk dapat dilakukan mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tanpa perencanaan yang jelas akan mengakibatkan prosedur kerja menjadi tidak menentu, tidak jelas dan tidak terarah sehingga tujuan tidak tercapai yang akhirnya dapat mengecewakan pihak-pihak yang berkaitan dengan aktifitas yang dilakukan.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang dikembangkan secara detail dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus merupakan langkah yang sangat penting dilakukan guru sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Perencanaan yang matang akan mengarahkan pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, menantang, kreatif, memotivasi dan menyenangkan. Adapun kegiatan perencanaan pembelajaran meliputi aspek sebagai berikut: penentuan identitas

mata pelajaran, perumusan indikator, perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber belajar, pemilihan media belajar, menentukan model pembelajaran, kesesuaian skenario pembelajaran, dan melakukan penilaian (Kemendikbud, 2013 : 37).

Fadlillah (2014 : 149) menguraikan RPP harus mencakup : 1) data sekolah, mata pelajaran dan kelas/semester; 2) materi pokok; 3) alokasi waktu; 4) tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi; 5) materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat dan sumber belajar; 6) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; 7) penilaian. RPP sekurang-kurangnya memuat KD, indikator yang akan dicapai, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran, langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar serta penilaian.

Permendikbud No 65 tahun 2013 tentang Standar Proses bahwa setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

Soni (2014: 7) mengatakan salah satu kewajiban guru sebelum melaksanakan pembelajaran adalah menyusun perangkat pembelajaran. RPP merupakan pedoman dan arahan tentang kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran oleh guru dari awal sampai dengan berakhirnya

pembelajaran. Dalam arti bahwa agar apa yang diinginkan setelah proses pembelajaran berlangsung, peserta didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tertentu sebagaimana yang ditentukan. Jika proses pembelajaran yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPP sebelumnya, tentu sudah bisa dipastikan bahwa proses pembelajaran akan berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Dengan perkataan lain bahwa RPP dapat berfungsi sebagai kompas pembelajaran, dirancang oleh setiap guru berdasarkan standar yang telah ditentukan. Untuk itu dalam proses pembuatannya diperlukan pemahaman mendalam terhadap setiap komponen atau indikator RPP tersebut sehingga guru mampu merancang dan mengembangkan sendiri.

Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa RPP merupakan rancangan pembelajaran wajib dipersiapkan oleh guru menjadi pegangan dan penuntun dalam proses pembelajaran di kelas. Hasil wawancara peneliti dengan Koordinator pengawas DIKMEN Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi serta dengan pengawas rumpun Matematika pada Januari 2016, tidak sedikit guru matematika SMA yang ada di Kabupaten Dairi yang belum memahami betul tentang penyusunan RPP kurikulum 2013, dalam penyusunan RPP kurikulum KTSP sajapun guru masih banyak yang belum mampu. Kebanyakan guru hanya copy paste dari teman guru yang lain atau mengunggah dari internet. Data observasi pengawas matematika tahun pelajaran 2014/2015 dari 17 guru PNS dan 9 non PNS, 19 orang menunjukkan RPPnya namun hanya 7 yang cukup memadai,

sisanya masih copy paste dan menunglah dari internet tanpa mengadaptasi dengan kondisi peserta didiknya. 7 orang guru tidak mampu menunjukkan RPP nya dengan alasan tinggal, hilang dan tidak membuat RPP.

Dari beberapa guru yang sudah mempersiapkan RPP setelah diamati dengan cermat ditemukan bahwa beberapa komponen RPP belum lengkap, seperti komponen tujuan pembelajaran tidak dicantumkan, metode pembelajaran yang kurang variatif, sumber belajar yang terbatas, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya masih dangkal dalam menggunakan pendekatan saintifik sesuai kaidah Permendikbud No. 81 A tahun 2013, jenis penilaian belum mencakup aspek sikap, pengetahuan dan psikomotor dan sementara yang lain tidak mencantumkan rubrik penilaian.

Hasil survey penilaian awal dengan menggunakan Instrumen Penilaian RPP bahwa RPP yang disusun oleh guru matematika SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 diperoleh nilai 46,4 (62 %) termasuk kategori cukup. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan guru matematika menyusun RPP masih rendah, hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman terhadap komponen-komponen RPP.

Secara rinci hasil penilaian awal terhadap komponen RPP yang disusun oleh guru matematika SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Sidikalang diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Hasil Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran**

No	Aspek Yang Dinilai	Kode Guru/skor							Rata-rata	
		Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Skor	%
1	Identitas RPP	3	2	2	2	2	3	2	2.29	76
2	Perumusan Indikator	5	5	6	6	5	6	5	5.43	60
3	Perumusan Tujuan Pembelajaran	4	4	3	4	3	4	4	3.71	62
4	Pemilihan Materi Ajar	6	6	8	8	7	7	5	6.71	75
5	Pemilihan Sumber Belajar	5	5	6	6	6	5	6	5.57	62
6	Pemilihan Media Belajar	6	5	6	6	4	6	5	5.43	60
7	Model Pembelajaran	4	4	4	3	4	4	3	3.71	62
8	Skenario Pembelajaran	8	9	8	7	7	8	8	7.86	66
9	Penilaian	6	5	6	6	6	6	5	5.71	48
	Jumlah Skor	47	45	49	48	44	49	43	46.4	
	Nilai akhir	62.7	60	65.3	64	58.7	65.3	57.3	61,9	
	Kategori Nilai	C	C	C	C	K	C	K	C	

*Sumber : Data awal hasil telaah RPP yang diolah*

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran masih tergolong rendah (kategori cukup) terutama pada aspek Penilaian (48 %), Pemilihan Media Belajar (60%), Perumusan Indikator (60%), Perumusan Tujuan Pembelajaran (62%), Model Pembelajaran (62%), Pemilihan Sumber Belajar (62%), Skenario Pembelajaran (66%), Pemilihan Materi Ajar (75%), dan Identitas Mata Pelajaran (76%).

Fenomena yang dialami oleh guru tersebut sangat memprihatinkan. Sebagai tenaga profesional seharusnya para guru menyadari kekeliruannya dan bersikap terbuka dengan apa yang mereka alami, sehingga kondisi tersebut di atas tidak akan pernah terjadi. Peneliti berasumsi bahwa para guru belum memahami

sepenuhnya komponen-komponen RPP dan bagaimana menyusun RPP yang sistematis dan lengkap. Perangkat pembelajaran yang diserahkan ke sekolah setiap tahun ajaran baru nampaknya hanya sekedar melengkapi administrasi belaka, tidak ada tindakan supervisi oleh supervisor baik kepala sekolah maupun pengawas mata pelajaran. Di samping itu guru belum menyadari kesulitan yang dihadapi, ditambah dengan sikap guru tertutup sehingga tidak menyampaikannya kepada supervisor. Beberapa faktor yang patut diprediksi dapat memengaruhi kekurangmampuan guru menyusun RPP antara lain guru tidak mau mencoba menyusun sendiri, motivasi kurang, tidak fokus pada pekerjaan akibat banyaknya urusan pribadi dan keluarga, ketergantungan kepada sesama guru, adanya prototype guru tukang kritik dan terlalu sibuk, tersedia RPP yang bisa diunduh di internet dengan waktu dan biaya yang sedikit.

Faktor lain yang tidak kalah penting dapat mempengaruhi ketidakmampuan atau ketidakmauan guru menyusun RPP adalah kurang efektifnya supervisi bagi guru. Sebagian guru sudah mendapat bimbingan melalui supervisi, namun belum benar-benar mahir dan sebagian lagi belum mendapatkan bimbingan. Supervisi pendidikan atau disebut juga supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang dapat membantu guru dalam pekerjaannya, mengembangkan profesinya, memperbaiki kekeliruan guru, membina guru dalam perencanaan maupun proses pembelajaran sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

Sebenarnya ada berbagai pendekatan, model dan teknik supervisi pendidikan. Pendekatan supervisi meliputi pendekatan direktif, pendekatan non

direktif dan pendekatan kolaboratif. Model supervisi meliputi: (Aedi, 2014: 55-63) (1) Model konvensional, model ini mencerminkan kondisi supervisi yang feodal dan otoriter. Supervisor cenderung mencari – cari kesalahan yang disupervisinya. (2) Model pendekatan sains, dalam model ini supervisor melaksanakan kegiatan supervisinya berdasarkan pendekatan ilmiah. Ciri-cirinya : (i) dilaksanakan terencana dan kontinu; (ii) sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu; (iii) menggunakan instrumen pengumpulan data; (iv) ada data objektif yang diperoleh dari keadaan riil. (3) Model supervisi klinis, model ini merupakan proses pembinaan yang terdiri dari tiga siklus yaitu awal (*pre-conference*), observasi, dan akhir (*post-conference*). (4) Model supervisi artistik, dalam model ini supervisor diibaratkan sebagai seorang pelatih musik yang tidak hanya memiliki kemampuan mendengar, mengobservasi aksi para pemain musik (guru) yang melakukan pementasan, tetapi juga harus mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi dalam ‘menikmati’ alunan musik yang dimainkan. (5) Model gabungan supervisi saintifik, klinis dan artistik. (6) Supervisi model pengembangan, model ini merupakan suatu pedoman melaksanakan supervisi yang mengarahkan pada sejumlah tugas dan keterampilan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan profesionalitas guru. Sementara teknik supervisi terdiri dari supervisi yang bersifat individual dan supervisi yang bersifat kelompok. Dengan demikian supervisor dapat memilih alternatif dari model, pendekatan dan teknik supervisi sesuai dengan masalah-masalah yang urgen untuk diterapkan dalam melaksanakan supervisi sehingga tujuan supervisi dapat tercapai dan fungsi supervisi benar-benar dirasakan oleh guru. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Sergiovanni dalam Fathurrohman dan Ruhyani (2015 : 52) tujuan supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud 1) membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik, mengelola kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya, dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu; 2) untuk memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian murid-muridnya. Memonitor di sini bukan berarti untuk mencari kesalahan guru, melainkan lebih pada pengendalian dan peningkatan kualitas kinerja guru; 3) untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, dan mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh (commitment) terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Sementara fungsi supervisi dikemukakan Sahertian (2010: 21) bahwa fungsi utama supervisi ialah perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran serta pembinaan pembelajaran sehingga terus dilakukan perbaikan pembelajaran.

Supervisor, sebelum melakukan supervisi seharusnya sudah terlebih dahulu membuat atau menyusun program pengawasan sebagai manajemen kinerja sehingga tujuan dan fungsi supervisi dapat terarah dan terwujud sesuai yang diharapkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Permenpan No 21 tahun 2010 tentang jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, menetapkan tugas pokok pengawas ialah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi : 1) penyusunan program pengawasan, 2)



pelaksanaan pembinaan, 3) pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar nasional Pendidikan, 4) penilaian, 5) pembimbingan dan pelatihan profesional guru, 6) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan 7) pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Dengan demikian pengawas sekolah sebagai “gurunya guru” memiliki tugas pokok dan fungsi menilai dan membina.

Sesungguhnya setiap guru mempunyai potensi besar, dan akan tampak bilamana mereka benar-benar mendapat kesempatan untuk dibina maupun dibimbing. Hanya terkadang hal itu tidak mereka peroleh. Di samping itu supervisi yang kurang efektif atau kurang maksimal dapat menjadi salah satu penghambat bagi guru untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya tersebut. Khususnya supervisi dalam perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran merupakan hal yang tidak terlepas dari tupoksinya guru, hendaknya mendapat perhatian serius dari para supervisor sehingga kinerja guru meningkat dan berkontribusi positif terhadap hasil belajar siswa dan mutu pendidikan. Sementara itu profesi guru perlu dibina dan dikembangkan terus menerus agar dapat melakukan fungsinya secara profesional sebagaimana dikemukakan oleh Sahertian (2010 : 1) Dalam usaha meningkatkan kualitas sumberdaya pendidikan, guru merupakan komponen sumberdaya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus menerus. Pembentukan profesi guru dilaksanakan melalui program pendidikan pra jabatan (pre-service education) maupun program dalam jabatan. Tidak semua guru yang dididik di lembaga pendidikan terlatih dengan baik dan kualified. Potensi sumberdaya guru itu perlu terus menerus bertumbuh dan berkembang agar dapat

melakukan fungsinya secara profesional. Selain itu, pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru-guru untuk terus menerus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat. Itulah alasan sebabnya mengenai perlunya supervisi.

Sagala (2013: 235) mengemukakan kenyataannya, beberapa guru tidak merasakan bahwa supervisor pengajaran mencurahkan waktu yang cukup untuk perbaikan pengajaran, jadi supervisor tidak memberikan bantuan yang diharapkan oleh guru. Kemudian dilihat dari penyiapan supervisor pengajaran, bahwa penyiapan supervisor pengajaran melalui *coursework*, praktek dan pengalaman lapangan untuk membantu supervisor menganalisis secara akurat kondisi-kondisi kelas dan memberi rekomendasi yang tepat untuk peningkatan belajar bagi para siswanya. Selanjutnya Sagala mengatakan bahwa seorang supervisor dapat menggunakan berbagai teknik supervisi dalam upaya mengatasi problem dan tantangan yang dihadapi guru. Teknik-teknik supervisi tersebut digunakan berdasarkan masalah-masalah pokok yang dihadapi guru yang harus diperbaiki dalam mengajar.

Ametembun (2000:12) mengatakan bahwa “Pembinaan yang dimaksudkan dalam supervisi adalah berupa bimbingan dan tuntunan ke arah pembinaan diri orang-orang yang disupervisi dalam arti memperbesar dan mengembangkan kesanggupannya untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan kesanggupan sendiri”.

Bolla (dalam Sagala 2013: 234) Supervisi merupakan keharusan bagi guru dengan alasan sulit untuk memisahkan, merefleksikan dan menyadari tingkah

lakunya bila sedang berinteraksi dengan siswa di kelas. Beberapa problema yang dihadapi guru dilihat dari perbedaan antara lain adalah perbedaan latar belakang pendidikan, orientasi professional, tujuan dan keterampilan, kesanggupan jasmani, kualifikasi kemampuan memimpin, kondisi psikologik dan pengalaman mengajar.

Masaong (2013: 4) mengatakan dewasa ini kegiatan supervisi oleh sebagian supervisor (pengawas) masih berorientasi pada pengawasan (kontrol) dan obyek utamanya adalah administrasi, sehingga suasana kemitraan antara guru dan supervisor kurang tercipta dan bahkan guru secara psikologis merasa terbebani dengan pikiran untuk dinilai. Padahal kegiatan supervisi akan efektif jika perasaan terbebas dari berbagai tekanan diganti dengan suasana pemberian pelayanan serta pemenuhan kebutuhan yang bersifat informal. Aspek lain yang mengakibatkan kegiatan supervisi kurang bermanfaat menurut Semiawan (dalam Imron, 2000:43) adalah bahwa sistem supervisi kurang memadai dan sikap mental dari supervisor yang kurang sehat. Kurang memadainya sistem supervisi dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain: (1) supervisi masih menekankan pada aspek administratif dan mengabaikan aspek profesional, (2) tatap muka antara supervisor dan guru-guru sangat sedikit, (3) supervisor banyak yang sudah lama tidak mengajar, sehingga banyak dibutuhkan bekal tambahan agar dapat mengikuti perkembangan baru, (4) pada umumnya masih menggunakan jalur satu arah dari atas ke bawah, dan (5) potensi guru sebagai pembimbing kurang dimanfaatkan. Sedangkan dikaji dari sikap mental yang kurang sehat dari supervisor terlihat beberapa indikasi, yaitu; (1) hubungan profesional yang kaku

dan kurang akrab akibat sikap otoriter dari supervisor, sehingga guru takut bersifat terbuka kepada supervisor, (2) banyak supervisor dan guru merasa sudah berpengalaman, sehingga merasa tidak perlu lagi belajar, (3) supervisor dan guru merasa cepat puas dengan hasil belajar siswa. Sementara dari sifatnya (Sahertian, 2010: 131) mengungkapkan bahwa supervisi yang diberikan guru-guru dalam tugas mengajar dan mendidik sampai saat ini masih bersifat umum. Oleh karena itu supervisi yang diberikan disebut supervisi yang umum (*general supervision*). Yang dibicarakan menyangkut masalah kegiatan belajar mengajar yang bersifat umum.

Selanjutnya hasil penelitian Widodo (2007) dalam Agus Riyanto, Samsudi, dan Fakhruddin (2015: 2) Jurnal Penelitian Tindakan Sekolah dan Kepengawasan Vol. 2, No. 1, Juni 2015 ISSN 2355-9683 bahwa permasalahan kepengawasan yang muncul di lapangan menemukan bahwa pelaksanaan supervisi oleh pengawas di Indonesia masih jauh dari teori supervisi karena supervisi yang berlangsung selama ini masih cenderung kepada inspeksi atau pengawasan saja. Pengawasan yang dilakukan juga tidak rutin serta terkesan mencari-cari kesalahan dari guru. Kegiatan supervisi tidak sesuai dengan kebutuhan guru. Permasalahan tersebut muncul karena adanya kendala-kendala baik secara struktur dan kultur. Secara struktur sebutan untuk orang yang melaksanakan supervisi adalah pengawas bukan supervisor, hal ini menyebabkan paradigma pemikiran mengarah ke inspeksi. Kendala lainnya adalah ruang lingkup dari pekerjaan pengawas cenderung menekankan pada aspek administratif, latar budaya kultural seperti budaya ewuh perkewuh menjadikan guru dan pengawas tidak terbuka dalam

proses supervisi. Kondisi yang ada saat ini jumlah pengawas pendidikan yang tidak seimbang dengan jumlah sekolah dan guru yang harus diawasi menjadikan beban tugas pengawas menjadi sangat berat dan akhirnya tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Supervisi pada hakikatnya haknya guru dan merupakan bagian pengembangan profesional guru, sayangnya banyak guru yang tidak memahaminya sehingga jarang guru menyampaikan permasalahan yang dihadapinya di kelas atau menyangkut perencanaan, proses maupun penilaian pembelajaran. Atau singkatnya jarang guru meminta sendiri supervisor untuk melaksanakan supervisi. Guru hanya bersifat menunggu dengan was-was kapan supervisor datang ke sekolah.

Supervisi pendidikan dapat dilaksanakan dengan berbagai pendekatan, model dan teknik, yang dapat membantu guru mengatasi berbagai kesulitan dalam kegiatan pengajarannya. Terkait dengan kemampuan guru menyusun RPP, diprediksi model supervisi yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah supervisi model pengembangan. Pada pendekatan ini supervisor akan melihat tingkat konsepsi guru sebelum memilih pendekatan apa yang akan diterapkan pada guru tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif yang beranggapan bahwa belajar adalah hasil perpaduan antara kegiatan individu dengan lingkungan pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Supervisi Model pengembangan ini memiliki ciri tercipta hubungan manusiawi (terbuka, penuh kedekatan dan kehangatan) memotivasi,

instrumen atas kesepakatan bersama, muncul dari harapan dan dorongan guru, balikan diberikan secara objektif dan secepat mungkin.

Pada umumnya guru matematika di SMA Negeri 1 Sidikalang dan SMA Negeri 2 Sidikalang sudah mendapatkan pelatihan dan bimbingan baik melalui MGMP, sekolah atau dinas mengenai implementasi kurikulum 2013 namun model pelaksanaannya masih berbasis guru belum berbasis satuan pendidikan (sekolah). Artinya para guru mendapat pelatihan atau bimbingan secara individual dan diharapkan mereka membagikan kepada sesama guru di sekolah. Sementara itu bilamana ada hal-hal yang kurang dipahami tentu akan lebih baik bila didiskusikan bersama.

Sepanjang pengetahuan dan pengamatan peneliti, supervisi model pengembangan belum pernah diterapkan oleh supervisor terhadap guru matematika di SMA Negeri 1 Sidikalang dan SMA Negeri 2 Sidikalang, sehingga menurut peneliti supervisi model pengembangan ini cocok menjadi inovasi untuk memperkaya pengetahuan supervisor (pengawas) di Sidikalang.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diprediksi bahwa kemampuan guru menyusun RPP dapat ditingkatkan dengan supervisi, dan di antara banyak model yang dapat digunakan, model yang diduga lebih tepat diterapkan dalam membantu guru membuat RPP adalah supervisi model pengembangan. Untuk membuktikan hal tersebut perlu dilakukan penelitian tindakan yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Guru Matematika Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 Melalui Supervisi model pengembangan pada SMA di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. ”

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi berbagai masalah dan upaya yang dapat dilakukan dalam membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyusunan RPP, sebagai berikut:

1. Kurangnya motivasi dan komitmen yang dimiliki guru,
2. Guru belum berani mencoba membuat RPP sendiri,
3. Supervisi yang diterima guru kurang menarik minat dan motivasi guru,
4. Banyaknya guru yang belum paham bahwa supervisi adalah kebutuhan mereka,
5. Supervisi yang diberi pengawas atau kepala sekolah belum berkelanjutan,
6. Supervisi yang diterima guru belum optimal,
7. Guru belum mendapat supervisi tentang penyusunan RPP
8. Tersedianya RPP alternatif yang dapat diunduh dari internet atau media lain dengan mudah sehingga tidak termotivasi membuat RPP sendiri.
9. Guru belum pernah mendapat pembinaan melalui supervisi model pengembangan.
10. Beberapa model supervisi yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam kegiatan pembelajaran, di antaranya, (a) model Konvensional, (b) model Pendekatan Sains, (c) model pengembangan, (d) Model Artistik, (e) model Klinis, (f) model Gabungan (sains, klinis dan artistik)

Sedangkan usaha yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP antara lain: (1) Mengadakan Workshop/ Lokakarya, (2) Bimbingan Teknis, (3) Diskusi Sesama Guru, (4) Belajar Mandiri, (5) Tutor Sebaya, (6) IHT, (7) Studi Lanjut, (8) Pendidikan dan Latihan, (9)

Mengaktifkan MGMP/KKG di sekolah, (10) Memberi bantuan melalui model Supervisi Klinis, (11) Memberi bantuan melalui supervisi model pengembangan.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Banyak model yang dapat diterapkan dalam membantu guru menyusun RPP, namun dalam penelitian ini dibatasi hanya pada supervisi model pengembangan dengan pertimbangan bahwa supervisi model pengembangan memandang guru sebagai individu yang berada pada berbagai tingkat pertumbuhan dan perkembangan profesionalitas yang beragam sehingga guru dapat meningkatkan kemampuannya dengan maksimal. Penelitian ini dapat dilakukan di mana saja, namun karena fenomena yang ditemukan terjadi di Kabupaten Dairi, maka penelitian ini dibatasi hanya kepada guru matematika yang ada pada SMA Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah penerapan supervisi model pengembangan dapat meningkatkan kemampuan guru matematika menyusun RPP Kurikulum 2013 pada SMA di Kecamatan Sidikalang kabupaten Dairi?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peningkatan kemampuan guru matematika menyusun rencana



pembelajaran (RPP) kurikulum 2013 melalui supervisi model pengembangan pada SMA Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian peningkatan kemampuan guru matematika menyusun rencana pembelajaran (RPP) kurikulum 2013 melalui supervisi model pengembangan diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

#### **1.6.1. Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis berguna untuk pengembangan teori kompetensi guru dan teori supervisi. Teknik supervisi yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan kompetensi guru.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan berbagai pihak, terutama bagi:

1. Pengawas sekolah, sebagai bahan masukan untuk dapat digunakan membimbing guru secara individu.
2. Kepala sekolah sebagai bahan masukan untuk dapat mensupervisi dan membimbing guru secara individu di sekolahnya dalam meningkatkan kompetensi guru di sekolah.
3. Guru sebagai bahan masukan untuk pengembangan diri dalam meningkatkan kemampuannya.
4. Peneliti lain sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini.